

Katalog: 2303012.76



STATISTIK

ANGKATAN KERJA

Provinsi Sulawesi Barat

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**



STATISTIK
ANGKATAN KERJA
Provinsi Sulawesi Barat
2021

Statistik Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2021

ISSN: 2655-0334

Nomor Publikasi: 76000.2232

Katalog: 2303012.76

Ukuran Buku: 17,5 x 25 cm

Jumlah Halaman: xii + 60 halaman

Naskah:

BPS Provinsi Sulawesi Barat

Penyunting:

BPS Provinsi Sulawesi Barat

Gambar Kulit:

BPS Provinsi Sulawesi Barat

Diterbitkan Oleh:

© BPS Provinsi Sulawesi Barat

Dicetak Oleh:

Erlangga Grafis

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Pengarah

Tina Wahyufitri, S.Si., M.Si.

Penanggung Jawab

Heni Djumadi, S.ST.

Penyunting

Heni Djumadi, S.ST.

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Aan Setyawan, S.ST., M.Si.

Saiyed Andi Bangsawan, S.E., M.M.

Penata Letak

Aan Setyawan, S.ST., M.Si.

KATA PENGANTAR

“Statistik Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2021” merupakan publikasi yang membahas perkembangan kondisi angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021. Kondisi angkatan kerja yang dibahas dalam publikasi ini meliputi profil angkatan kerja, pekerja, dan pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat ditinjau dari aspek wilayah desa/kota, kelompok umur, dan tingkat pendidikan.

Data dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2021, dimana Sakernas merupakan survei khusus yang dilaksanakan dua kali dalam setahun untuk menangkap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen data serta memperkaya informasi terkait kondisi angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021.

Selesaiannya publikasi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Untuk perbaikan dan penyempurnaan pada publikasi berikutnya, saran dan masukan dari pembaca akan sangat berarti.

Mamuju, September 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Barat



TINA WAHYUFITRI, S.Si.,M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Penjelasan Umum	4
BAB 2 KETENAGAKERJAAN	11
2.1. Angkatan Kerja	13
2.2. Penduduk yang Bekerja	16
2.3. Lapangan Pekerjaan	18
2.4. Status Pekerjaan	20
2.5. Pekerja Paruh Waktu	24
2.6. Jumlah Jam Kerja	25
2.7. Pendidikan Pekerja	27
BAB 3 PENGANGGURAN DAN SETENGAH PENGANGGURAN	29
3.1. Pengangguran.....	31
3.2. Setengah Pengangguran	36
LAMPIRAN	39



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 - 2021	14
Tabel 2.2.	Penduduk Usia Kerja, Penduduk yang Bekerja dan EPR di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 - 2021	17
Tabel 2.3.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	19
Tabel 2.4.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	21
Tabel 2.5.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	26
Tabel 3.1.	Jumlah Angkatan Kerja, Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	32
Tabel 3.2.	Indikator Pengangguran Umur Muda dan Umur Dewasa di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	33
Tabel 3.3.	Indikator Setengah Pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Konsep Dasar Ketenagakerjaan	4
Gambar 2.1.	TPAK Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	15
Gambar 2.2.	Persentase Pekerja Informal di Provinsi Sulawesi Barat, 2021.....	22
Gambar 2.3.	Persentase Pekerja Rentan (<i>Vulnerable Employment</i>) di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	23
Gambar 2.4.	Persentase Pekerja Paruh Waktu di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	24
Gambar 2.5.	Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	28
Gambar 3.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	35
Gambar 3.2.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	37

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1A.	Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	41
Tabel 1B.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 - 2021	42
Tabel 2A.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, 2021.....	43
Tabel 2B.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 - 2021	44
Tabel 3A.	Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	45
Tabel 3B.	Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 - 2021 ..	46
Tabel 4A.	Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	47
Tabel 4B.	Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 - 2021 ...	48
Tabel 5A.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	49
Tabel 5B.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 - 2021	50
Tabel 6A.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan/Usaha Utama, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, 2021.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 6B.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2020-2021	52
Tabel 7A.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jam Kerja Selama Seminggu yang lalu, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	53
Tabel 7B.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jam Kerja Selama Seminggu yang lalu di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 - 2021	54
Tabel 8A.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	55
Tabel 8B.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 - 2021	56
Tabel 9A.	Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	57
Tabel 9B.	Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020-2021	58
Tabel 10A.	Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	59
Tabel 10B.	Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020-2021	60





<http://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gambaran ini sangat penting bagi perencana pembangunan, pengambil kebijakan, maupun pihak lain dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan. Khusus bagi pengambil keputusan, informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengambil kebijakan dalam memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat.

Salah satu sumber penyajian data ketenagakerjaan berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan secara berkesinambungan. Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan, baik itu mengenai jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran beserta karakteristiknya. Publikasi ini memuat hasil Sakernas yang dalam penyajiannya juga disertakan analisis sederhana terkait beberapa indikator ketenagakerjaan. Dalam publikasi ini disajikan pula berbagai informasi umum tentang ketenagakerjaan hasil Sakernas Agustus tahun 2021 yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai kalangan sesuai kebutuhan. Ulasan yang diberikan dilihat dari sejumlah indikator dan karakteristik ketenagakerjaan pada umumnya, sedangkan untuk mengetahui lebih rinci dapat dilihat dalam tabel-tabel yang juga dilampirkan dalam bagian akhir publikasi ini.

Tujuan penyusunan publikasi ini adalah untuk menyediakan statistik ketenagakerjaan, meliputi gambaran umum, karakteristik penduduk yang bekerja serta profil pengangguran.



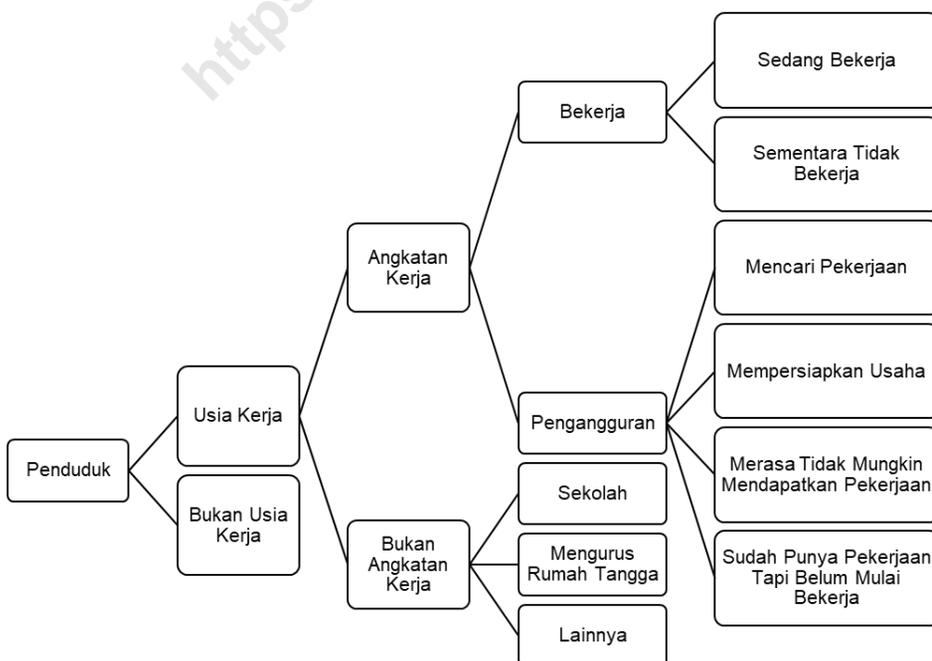
1.2. Penjelasan Umum

Untuk memahami data yang disajikan dalam publikasi ini, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa penjelasan teknis seperti konsep dan definisi yang digunakan. Penjelasan teknis ini diharapkan agar pengguna data memiliki persepsi yang sama dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam publikasi ini.

Ada beberapa pendekatan usia kerja, tergantung dengan kebutuhan dan arah analisis serta kebijakan yang diinginkan. Untuk memberikan kemudahan bagi pengguna data, dalam publikasi ini ditampilkan pembatasan usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Penghitungan jumlah penduduk yang bekerja dan menganggur didasarkan pada konsep dasar pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Konsep Dasar Ketenagakerjaan



Beberapa konsep ketenagakerjaan:

a. Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

b. Penduduk Bukan Usia Kerja

Penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun.

c. Angkatan Kerja

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja dan pengangguran

d. Bukan Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah penduduk usia kerja yang pada periode referensi tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain).

e. Bekerja

Bekerja yaitu kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam **dalam seminggu yang lalu**. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena cuti, sakit dan sejenisnya.

Di beberapa negara, konsep bekerja didasarkan atas kebiasaan (*Gainful Worker Concept*). Konsep ini menentukan seseorang apakah bekerja atau tidak berdasarkan kebiasaannya (*usual activity*). Konsep ini tidak memakai batasan waktu tertentu.

f. Sementara Tidak Bekerja

Sementara tidak bekerja adalah orang yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, dan sejenisnya.

g. Pengangguran

Terdapat dua definisi pengangguran, yaitu definisi standar dan definisi luas (*relaxed*). Pengangguran definisi standar yaitu meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan suatu usaha. Sedangkan pengangguran definisi luas juga mencakup penduduk yang tidak aktif mencari kerja tetapi bersedia/siap bekerja.

Kriteria pengangguran antara lain:

- 1) Mencari kerja, yaitu orang yang berusaha mencari pekerjaan (tidak terbatas dalam seminggu yang lalu).
- 2) Mempersiapkan usaha, yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha “baru” (bukan merupakan pengembangan usaha) dan bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan orang lain.
- 3) Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, yaitu mereka yang mengaku berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Termasuk mereka yang merasa karena situasi/kondisi atau iklim atau musim, tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.
- 4) Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja, yaitu mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Menurut Bellante dan Jackson (1990), jika dilihat dari penyebabnya pengangguran dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Mereka berada dalam keadaan menganggur karena informasi yang kurang sempurna dan biayanya mahal untuk memperolehnya. Disebut juga pengangguran normal.
- 2) Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena terdapat lowongan pekerjaan tetapi membutuhkan keahlian yang berbeda daripada yang dimiliki penganggur atau lowongan pekerjaan berada dalam kawasan geografis lain dari lokasi tempat tinggal penganggur.
- 3) Pengangguran karena kurangnya permintaan, yaitu timbul karena pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku, tingkat permintaan akan tenaga kerja secara keseluruhan terlampau rendah. Dengan kata lain, jumlah tenaga kerja yang diminta perekonomian secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pekerja yang menawarkan pekerjaan.

Menurut Sukirno (1995), akibat buruk yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran terhadap kegiatan perekonomian yaitu:

- 1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
- 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang.
- 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Akibat buruk yang ditimbulkan masalah pengangguran terhadap individu dan masyarakat yaitu:

- 1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan;
- 2) Pengangguran menyebabkan kehilangan keterampilan;
- 3) Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

h. Pekerja Tidak Penuh

Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Setengah Pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- 2) Pekerja paruh waktu (*part time worker*) yaitu jika seseorang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Konsep setengah pengangguran diperkenalkan untuk mengidentifikasi adanya kekurangan dalam bekerja (*lack of work*). Setengah pengangguran banyak terjadi di negara yang belum memiliki jaminan sosial bagi pengangguran, sehingga kondisi tersebut membuat seseorang harus melakukan pekerjaan apa saja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk pekerjaan yang tidak layak.

i. Pengangguran Terselubung

Di beberapa negara-negara berkembang yang terdapat kelebihan penawaran tenaga kerja dan sempitnya lapangan kerja terdapat pengangguran terselubung. Mereka yang secara konsep dan definisi tergolong dalam penduduk yang “bekerja”, tetapi sebetulnya jika dilihat dari segi produktifitas dalam pekerjaannya mereka adalah penganggur. Sebagai contoh, ada empat orang yang bekerja membuat sebuah kursi padahal sebenarnya bobot pekerjaannya cukup dikerjakan oleh dua orang saja dengan waktu yang sama. Kondisi inilah yang disebut pengangguran terselubung (Adioetomo dan Samosir, 2010).

j. Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan suatu organisasi/lembaga/usaha (*establishment*) tempat seseorang bekerja selama periode waktu acuan yang dibuat untuk data karakteristik ekonomi (atau yang dikerjakan terakhir, jika orang tersebut tidak bekerja). Kegiatan *establishment* adalah jenis barang yang diproduksi atau jasa yang diberikan.

k. Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Biasanya dikelompokkan menjadi:

- 1) Berusaha sendiri;
- 2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar;
- 3) Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar;
- 4) Buruh/karyawan/pegawai;
- 5) Pekerja bebas di pertanian;
- 6) Pekerja bebas di non pertanian;
- 7) Pekerja keluarga/tidak dibayar.

l. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan besaran penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum bekerja.

m. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT merupakan persentase penduduk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran menunjukkan besaran penduduk usia kerja yang siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), tetapi belum mendapatkan pekerjaan.



<https://www.bps.go.id>

BAB II

KETENAGAKERJAAN

2.1. Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Agustus 2021 berjumlah 1 008,65 ribu orang, terdiri dari 505,22 ribu laki-laki dan 503,43 ribu perempuan. Jumlah ini mengalami kenaikan 8,37 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2021. Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah penduduk usia kerja meningkat 16,90 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus 2020. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja merupakan dampak dari penambahan jumlah penduduk usia 15 tahun pada Agustus 2021 yang sebelumnya berusia 14 pada periode Februari 2021 atau Agustus 2020. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk usia kerja dapat diakibatkan oleh migrasi masuk, dimana terdapat penduduk usia kerja yang masuk dari luar wilayah dan menjadi penduduk Provinsi Sulawesi Barat pada Agustus 2021.

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Agustus 2021 mencapai 708,75 ribu orang. Mengingat mayoritas penduduk di Sulawesi Barat tinggal di wilayah perdesaan, 79,74 persen angkatan kerja berasal dari wilayah perdesaan dan sisanya berasal dari wilayah perkotaan. Dilihat dari struktur jenis kelamin, 61,37 persen angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 38,63 persen lainnya adalah perempuan. Sementara itu, terdapat 299,90 ribu penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan kerja. Penduduk yang tidak masuk dalam angkatan kerja tersebut mencakup penduduk usia kerja yang tidak aktif terlibat dalam pasar kerja dan memiliki kegiatan utama sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Pada bulan Agustus 2021, mayoritas penduduk usia kerja yang tidak masuk dalam angkatan kerja memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga.

Partisipasi aktif penduduk usia kerja dalam pasar kerja dapat dilihat dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK melihat seberapa besar partisipasi penduduk yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi produksi barang dan jasa maupun ketersediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk dilibatkan dalam kegiatan produksi barang atau jasa. TPAK merupakan proporsi angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

Tabel 2.1.
Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 – 2021

Uraian	2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	(1)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja	982 859	991 723	1 000 281	1 008 651
Angkatan Kerja	691 634	696 118	717 328	708 752
Bukan Angkatan Kerja	291 225	295 605	282 953	299 899
TPAK	70,37	70,19	71,71	70,27

Sumber: Diolah dari Sakernas 2020 – 2021

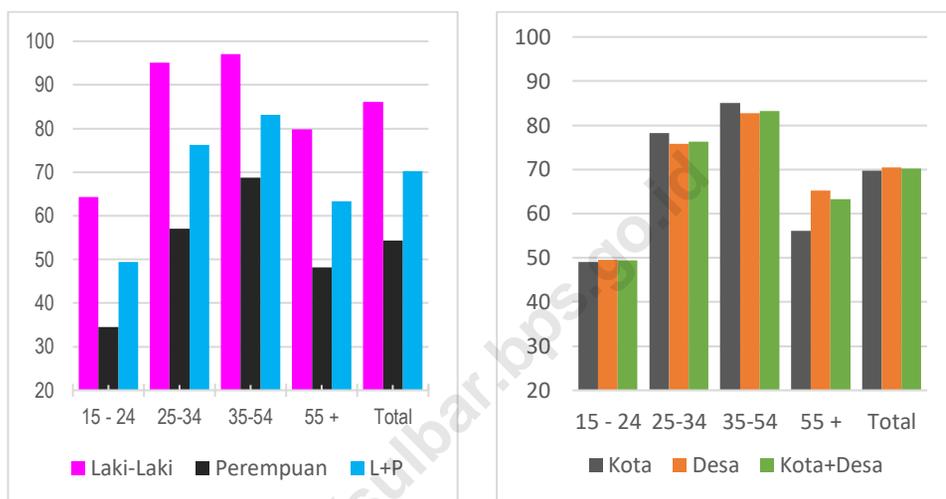
TPAK Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Agustus 2021 mencapai 70,27 persen. Dari angka ini dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat setidaknya 70 orang yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Agustus 2020 namun relatif lebih rendah jika dibandingkan Februari 2021. Kenaikan atau penurunan TPAK di Provinsi Sulawesi barat tidak lepas dari pengaruh musiman pada penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas atau pekerja keluarga di sektor pertanian. Pada musim tertentu, kegiatan pertanian maupun perikanan harus terhenti sementara sehingga menyebabkan pekerja bebas maupun pekerja keluarga di sektor ini tidak masuk dalam angkatan kerja.

Seperti yang disajikan pada Gambar 2.1., dapat dilihat bagaimana gambaran perbedaan TPAK menurut jenis kelamin, wilayah kota/desa, dan kelompok umur. Dari gambar tersebut terlihat bahwa TPAK memiliki pola naik pada kelompok umur 15-54 tahun dan mulai turun pada umur 55

tahun ke atas. Hal ini terjadi pada TPAK menurut jenis kelamin maupun wilayah desa/kota.

Gambar 2.1.

TPAK Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2021



Sumber: Diolah dari Sakernas 2020 – 2021

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki selalu lebih tinggi daripada TPAK perempuan di semua kelompok umur. Dari Gambar 2.1 terlihat bahwa TPAK laki-laki mencapai 86,10 persen, sedangkan TPAK perempuan 54,38 persen. Hal ini tidak terlepas budaya dan anggapan umum masyarakat yang memandang tugas laki-laki sebagai pencari nafkah utama di dalam rumah tangga, sedangkan perempuan dipandang memiliki tugas utama mengurus keluarga. Penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak yang terlibat aktif dalam bekerja, sedangkan perempuan yang tidak terlibat secara aktif di pasar kerja mayoritas memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, TPAK pada kelompok umur 35-54 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, sedangkan TPAK pada kelompok umur 15-24 tahun merupakan yang terendah. Umumnya, hal ini terjadi karena penduduk usia 35-54 tahun merupakan kelompok usia yang paling aktif dalam kegiatan bekerja, sedangkan penduduk kelompok umur 15-24

tahun masih aktif bersekolah. Pada penduduk kelompok umur 55 tahun ke atas, grafik TPAK turun disebabkan oleh produktivitas kerja penduduk di kelompok usia ini mulai menurun dan memasuki usia pensiun.

Total TPAK di wilayah perdesaan mencapai 70,41 persen, sedangkan TPAK di wilayah perkotaan mencapai 69,72 persen. Terdapat perbedaan pola TPAK pada penduduk yang tinggal di wilayah kota dan desa. TPAK pada kelompok umur 25-34 tahun yang tinggal di wilayah kota lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pada kelompok sama yang tinggal di wilayah desa. Sementara itu, TPAK pada penduduk kelompok umur 15-24 tahun di wilayah desa relatif agak lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah kota. Hal ini disebabkan karena penduduk kelompok usia 15-24 tahun di wilayah desa mayoritas sudah terjun ke pasar kerja, sedangkan penduduk di wilayah kota mayoritas masih melanjutkan pendidikan/sekolah. Pada kelompok umur 25-34 tahun, penduduk usia kerja di kota lebih banyak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi di pasar kerja. Setelah mencapai umur 55 tahun ke atas, partisipasi penduduk di wilayah kota pada kegiatan ekonomi mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan di wilayah desa. Hal ini disebabkan oleh penduduk di wilayah kota yang sudah memasuki usia pensiun, sedangkan penduduk di wilayah desa yang mayoritas bekerja di sektor pertanian masih aktif bekerja.

2.2. Penduduk yang Bekerja

Pada bulan Agustus 2021, total penduduk Sulawesi Barat yang bekerja adalah 686,54 ribu orang. Dari total penduduk yang bekerja, 80,06 persen tinggal di wilayah perdesaan, dan 19,94 persen lainnya tinggal di wilayah perkotaan. Jika dirinci menurut jenis kelamin, 61,24 persen penduduk bekerja adalah laki-laki. Total penduduk bekerja pada bulan Agustus 2021 mengalami kenaikan 13,56 ribu orang dibandingkan Agustus 2020. Rasio antara penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (*Employment to Population Ratio/EPR*) di Sulawesi Barat pada Agustus 2021 mencapai 68,07 persen. Dari angka ini, dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia kerja di Sulawesi Barat, terdapat setidaknya 68 orang yang aktif bekerja. Nilai EPR pada bulan Agustus 2021 mengalami penurunan 1,29 persen poin dibandingkan bulan Februari 2021, tetapi naik 0,21

persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2020. Dengan indikator EPR ini, dapat diketahui kemampuan ekonomi suatu wilayah dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia ke dalam lapangan pekerjaan.

Tabel 2.2.
Penduduk Usia Kerja, Penduduk Yang Bekerja dan EPR
di Provinsi Sulawesi Barat, 2020-2021

Uraian	2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja	982 859	991 723	1 000 281	1 008 651
Penduduk yang Bekerja	675 135	672 986	693 833	686 544
EPR	68,69	67,86	69,36	68,07

EPR: *Employment to Population Ratio*

Sumber: Diolah dari Sakernas 2020 – 2021

Pergerakan EPR di Sulawesi Barat pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 memiliki pola yang sejalan dengan TPAK. Nilai EPR turun pada bulan Agustus 2020, kemudian kembali naik pada bulan Februari, dan turun kembali pada Agustus 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan penduduk usia kerja Provinsi Sulawesi Barat dalam lapangan pekerjaan di bulan Agustus 2021 lebih besar dibandingkan Agustus 2020. Faktor-faktor yang memengaruhi pola EPR pada periode tertentu tidak jauh berbeda dari TPAK. Mengingat persentase penduduk Sulawesi Barat yang bekerja di sektor pertanian sebagai pekerja bebas atau pekerja keluarga cukup tinggi, faktor musim akan memengaruhi nilai EPR. Masa tunggu panen, cuaca buruk sehingga nelayan tidak dapat melaut, atau faktor lain yang menyebabkan kegiatan di sektor pertanian menurun akan diikuti oleh penurunan jumlah penduduk bekerja sekaligus penurunan EPR. Di bulan Februari, sektor pertanian di Sulawesi Barat

cenderung lebih aktif dan memerlukan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan bulan Agustus.

2.3. Lapangan Pekerjaan

Publikasi ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 untuk mengelompokkan lapangan pekerjaan utama penduduk yang bekerja. Terdapat lima kategori/sektor lapangan usaha yang ditampilkan dalam publikasi ini. Adapun kategori/sektor lapangan pekerjaan/usaha yang digunakan meliputi:

1. Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
2. Industri pengolahan;
3. Perdagangan besar, perdagangan eceran, rumah makan dan hotel;
4. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
5. Lainnya, yaitu: i) Pertambangan dan penggalian; ii) Listrik, gas, dan air; iii) Konstruksi; iv) Transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi; v) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan.

Seperti yang disajikan pada Tabel 2.3. dapat dilihat bahwa pertanian merupakan lapangan usaha yang menyumbang persentase tertinggi (47,22 persen) dan masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Sekitar 324,18 ribu penduduk Sulawesi Barat bekerja di sektor pertanian. Setelah sektor pertanian, sektor terbesar kedua adalah perdagangan (17,84 persen) dan jasa-jasa (15,23 persen). Sedangkan sisanya, penduduk di Sulawesi Barat bekerja pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 8,51 persen, dan sektor lainnya persentasenya 11,20 persen.

Berdasarkan klasifikasi daerah, penduduk di wilayah perkotaan paling banyak bekerja di sektor perdagangan (31,63 persen) dan jasa-jasa (22,98 persen). Berbeda dengan wilayah kota, penduduk di wilayah desa terserap di sektor pertanian (54,06 persen), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setidaknya 1 dari 2 penduduk di perdesaan bekerja di sektor pertanian. Mengingat lapangan pekerjaan dan lahan pertanian lebih banyak tersedia di desa, sektor pertanian masih menjadi mata pencarian utama di wilayah desa. Peluang bekerja di sektor perdagangan dan jasa-jasa lebih banyak tersedia di

wilayah kota, karena umumnya perilaku penduduk di wilayah kota cenderung lebih konsumtif. Selain itu, hal tersebut dikarenakan penduduk Sulawesi Barat lebih banyak yang tinggal di wilayah desa dibandingkan di kota.

Di Sulawesi Barat, baik penduduk laki-laki maupun perempuan paling banyak bekerja di sektor pertanian. Setelah sektor pertanian, sektor jasa dan sektor lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik, gas, dan air, konstruksi, transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan) merupakan lapangan usaha yang paling dominan dikerjakan oleh laki-laki. Sementara itu, persentase laki-laki di industri pengolahan kurang dari sepuluh persen. Untuk penduduk perempuan, sektor terbesar kedua dan ketiga adalah perdagangan dan jasa-jasa. Pada sektor industri pengolahan juga lebih banyak dikerjakan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Sementara itu, sektor lainnya pada perempuan persentasenya hanya sekitar dua persen.

Tabel 2.3
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Uraian	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	19,75	54,06	54,57	35,60	47,22
Industri Pengolahan	10,93	7,91	7,27	10,48	8,51
Perdagangan	31,63	14,41	10,11	30,06	17,84
Jasa-jasa	22,98	13,30	11,04	21,86	15,23
Lainnya	14,72	10,32	17,01	2,00	11,20
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

2.4. Status Pekerjaan

Status pekerjaan mengacu kepada kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Informasi status pekerjaan dibagi menjadi tujuh, yaitu: 1) Berusaha sendiri; 2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; 3) Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; 4) Buruh/karyawan/pegawai; 5) Pekerja bebas di pertanian; 6) Pekerja bebas di non pertanian; 7) Pekerja keluarga/ tidak dibayar. Informasi status pekerjaan utama yang disajikan dalam publikasi ini terdiri dari 4 kategori:

1. Berusaha (mencakup berusaha sendiri maupun berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar/buruh tetap/buruh dibayar);
2. Buruh/karyawan/pegawai;
3. Pekerja bebas (baik di pertanian maupun non pertanian)
4. Pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Pada Agustus 2021, mayoritas penduduk bekerja dengan status berusaha (47,21 persen). Status pekerjaan utama terbesar kedua adalah buruh/karyawan/pegawai, dan yang ketiga adalah pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Tingginya persentase pekerja keluarga/tidak dibayar menunjukkan bahwa masih cukup banyak penduduk yang bekerja tanpa memperoleh upah/gaji, sehingga sangat bergantung kepada kepala keluarga atau famili yang dibantu pekerjaannya. Sementara itu, terdapat 7,23 persen penduduk yang statusnya sebagai pekerja bebas, baik di pertanian maupun non pertanian. Seseorang dikatakan sebagai pekerja bebas apabila tidak memiliki majikan tetap dalam sebulan terakhir (pengecualian untuk sektor bangunan minimal memiliki majikan tetap selama 3 bulan terakhir).

Berdasarkan klasifikasi daerahnya, baik penduduk di wilayah perkotaan maupun perdesaan lebih dominan berstatus sebagai berusaha masing-masing 44,21 persen dan 47,96 persen. Status bekerja paling sedikit, baik di perkotaan maupun di perdesaan adalah pekerja bebas, yang hanya sebesar 6,68 persen di daerah perkotaan dan 7,37 persen di perdesaan.

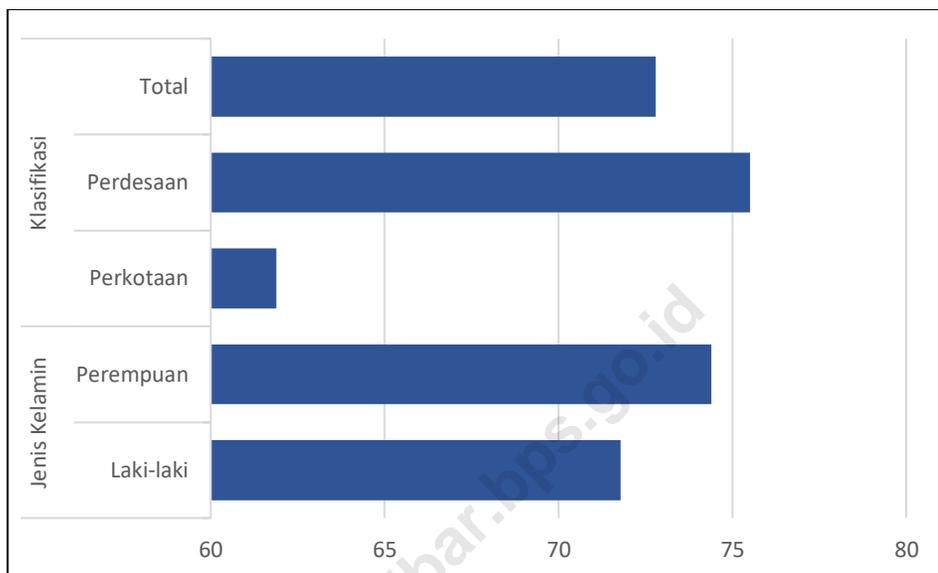
Tabel 2.4
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Status Pekerjaan Utama	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha	44,21	47,96	52,21	39,33	47,21
Buruh/Karyawan/Pegawai	35,98	23,50	26,67	24,91	25,99
Pekerja Bebas	6,68	7,37	10,72	1,73	7,23
Pekerja Keluarga/Pekerja Tidak Dibayar	13,13	21,17	10,41	34,04	19,57
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

Ditinjau dari jenis kelamin, terdapat perbedaan struktur status pekerjaan utama antara laki-laki dan perempuan, meskipun persentase terbesarnya masih sama, yaitu berusaha. Pada kelompok penduduk laki-laki, status pekerjaan utama terbesar setelah berusaha adalah buruh/karyawan/pegawai (26,67 persen) dan pekerja bebas (10,72 persen). Sedangkan pada kelompok penduduk perempuan, status pekerjaan utama yang paling dominan setelah berusaha adalah pekerja keluarga/tidak dibayar (34,04 persen) dan buruh/karyawan/pegawai (24,91 persen). Tingginya persentase perempuan pada status pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar umumnya disebabkan karena perempuan sebagai istri di dalam rumah tangganya membantu pekerjaan suaminya sebagai kepala rumah tangga tanpa upah/tidak dibayar. Dengan demikian, pendapatannya akan sangat bergantung pada pendapatan yang dihasilkan suami/pasangannya.

Gambar 2.2
Persentase Pekerja Informal di Provinsi Sulawesi Barat, 2021



Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

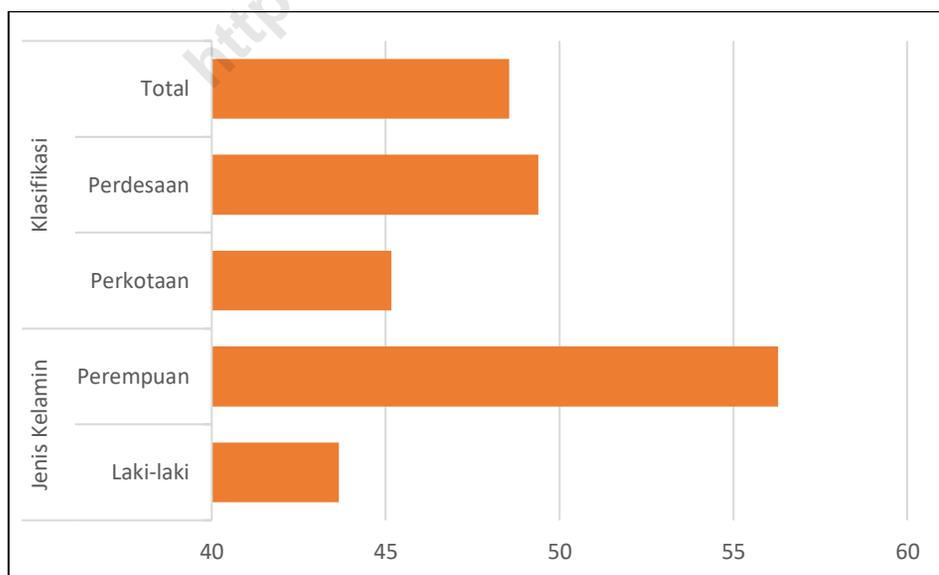
Dari indikator status pekerjaan utama, dapat diperoleh indikator lain yaitu persentase pekerja sektor informal. Pekerja di sektor informal yang dimaksud adalah mereka yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Pekerjaan pada sektor informal ini biasanya berbentuk usaha rumah tangga atau perorangan.

Pada bulan Agustus 2021, persentase pekerja informal di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 72,80 persen. Dari angka ini, dapat diartikan bahwa secara rata-rata, terdapat 72 sampai dengan 73 pekerja informal dari setiap 100 penduduk yang bekerja. Persentase pekerja informal pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini tidak lepas dari tingginya persentase perempuan yang berstatus sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Persentase pekerja sektor informal di wilayah perdesaan juga jauh lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Pekerjaan yang tersedia di wilayah desa mayoritas adalah usaha rumah tangga yang melibatkan kerabat/famili sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Dari data status pekerjaan, dapat pula diperoleh persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk yang bekerja. Konsep yang digunakan mengacu pada publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia yang merujuk kepada KILM-ILO (*Key Indicator of the Labour Market – International Labour Organization*), yaitu penduduk yang bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian maupun di non pertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Berdasarkan definisi tersebut, persentase pekerja rentan di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 48,55 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang yang bekerja terdapat sekitar 48 sampai dengan 49 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Mereka adalah orang-orang yang pada masa yang akan datang memiliki peluang paling besar untuk beralih jenis pekerjaan atau bahkan tidak bekerja lagi, baik sebagai pengangguran (karena masih membutuhkan pekerjaan) atau keluar dari angkatan kerja.

Gambar 2.3
**Persentase Pekerja Rentan (*Vulnerable Employment*)
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021**



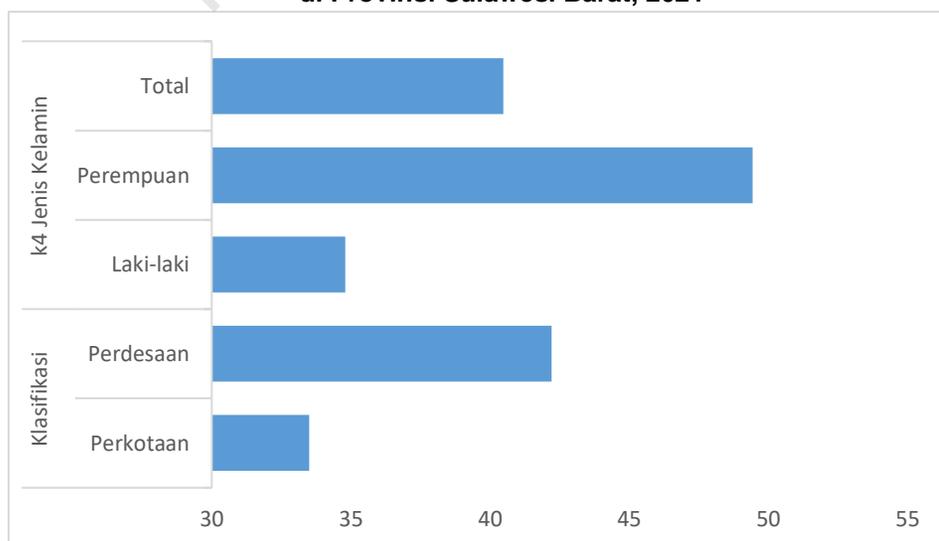
Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

Dilihat dari jenis kelamin, persentase pekerja rentan pada perempuan (56,29 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (43,65 persen). Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerahnya, pekerja rentan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Tingginya persentase pekerja rentan pada perempuan dan pekerja di wilayah perdesaan disebabkan oleh banyaknya pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar yang membantu kepala keluarga atau famili dalam rumah tangganya untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan.

2.5. Pekerja Paruh Waktu

Menurut jumlah jam kerjanya, pekerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerja penuh (bekerja minimal 35 jam dalam seminggu) dan pekerja tidak penuh (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu). Pekerja tidak penuh dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Pekerja paruh waktu adalah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja penuh/waktu normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Gambar 2.4
Persentase Pekerja Paruh Waktu
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021



Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

Dari 100 pekerja di Sulawesi Barat, terdapat 40 sampai dengan 41 orang yang tercatat sebagai pekerja paruh waktu. Angka ini turun 2,82 persen poin dibandingkan dengan bulan Februari 2021. Persentase pekerja paruh waktu pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dari total pekerja perempuan, hampir setengahnya merupakan pekerja paruh waktu. Sedangkan pada laki-laki, persentase pekerja paruh waktu mencapai 34,80 persen. Dilihat dari klasifikasi daerahnya, persentase pekerja paruh waktu di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Di wilayah perdesaan, persentase pekerja paruh waktu mencapai 42,22 persen.

2.6. Jumlah Jam Kerja

Pembahasan mengenai tenaga kerja tidak lepas dari pengukuran jumlah jam kerja. Dalam analisis ekonomi dan sosial, pengukuran jumlah jam kerja masyarakat penting dilakukan. Hal ini dikarenakan keterkaitan jam kerja terhadap beberapa aspek, diantaranya dari sisi pekerja dapat berdampak kepada tingkat kesejahteraan dan kesehatan pekerja, dan dari sisi perusahaan dapat berdampak kepada produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan. Dalam pelaksanaan Sakernas, yang dimaksud dengan jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu yang lalu. Untuk mempermudah penyajian, jumlah jam kerja tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa bagian.

Seperti yang disajikan pada Tabel 2.5 terdapat 42,38 persen penduduk Sulawesi Barat yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Dari angka ini, mayoritas adalah pekerja yang tinggal di daerah perkotaan dan berjenis kelamin laki-laki. Mengingat bahwa kota merupakan pusat kegiatan perekonomian, maka jam kerja di wilayah kota umumnya lebih tinggi dibanding di desa. Selain itu, pandangan bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama untuk pembiayaan sehari-hari dalam rumah tangga, maka jam kerja penduduk laki-laki menjadi lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tabel 2.5
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Jumlah Jam Kerja	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 Jam *)	5,98	6,62	6,51	6,47	6,49
1 – 7 Jam	3,62	6,5	4,01	8,94	5,92
8 – 14 Jam	9,86	13,61	9,55	18,1	12,87
15 – 24 Jam	15,1	18,76	16,83	19,93	18,03
25 – 34 Jam	12,42	14,78	15,44	12,52	14,31
35+ Jam	53,02	39,73	47,66	34,03	42,38
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Sementara tidak bekerja

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

Persentase penduduk dengan jumlah jam kerja 15-24 jam secara total menempati urutan kedua, diikuti oleh kelompok dengan jumlah jam kerja 25-34 jam dalam seminggu. Sementara itu, terdapat 5,92 persen penduduk dengan jumlah jam kerja 1-7 jam seminggu dan terdapat 6,49 persen penduduk yang sementara tidak bekerja. Persentase penduduk dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu di wilayah perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Begitu juga dengan kelompok penduduk perempuan, persentase penduduk perempuan dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

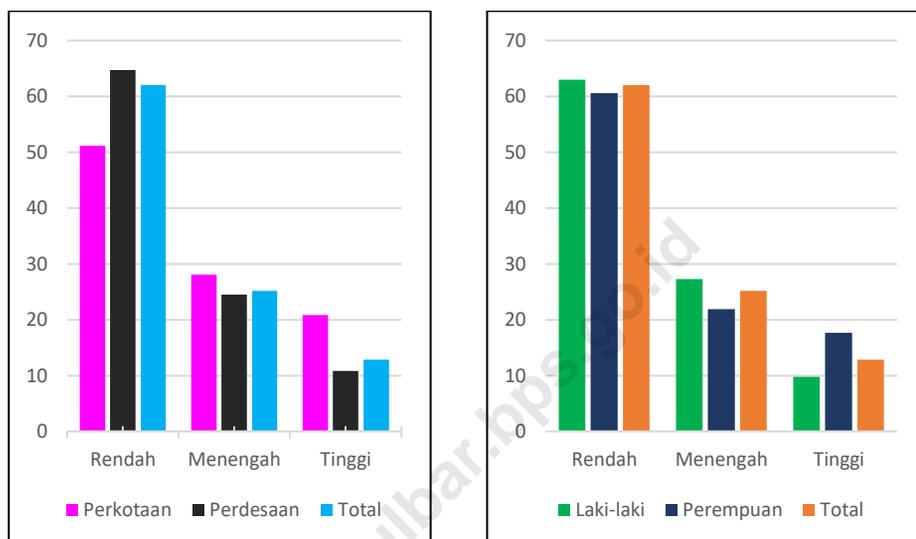
2.7. Pendidikan Pekerja

Tingkat pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kualitas pekerja. Pendekatan untuk mengukur tingkat pendidikan adalah melalui kepemilikan ijazah/STTB tertinggi yang ditamatkan, sebagai tanda bahwa penduduk tersebut telah menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Terdapat banyak kategori tingkat pendidikan yang ditamatkan, namun untuk keperluan analisis dalam publikasi ini akan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pendidikan rendah, yaitu pekerja yang telah menamatkan pendidikan maksimal pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pekerja yang tidak/belum pernah sekolah dan belum tamat sekolah dasar, tamat sekolah dasar atau sederajat, dan tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
2. Pendidikan Menengah yaitu pekerja yang sudah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pekerja yang tamat sekolah menengah atas atau sederajat dan sekolah menengah kejuruan.
3. Pendidikan Tinggi yaitu pekerja yang sudah menamatkan pendidikan minimal diploma I. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pekerja yang tamat Diploma I/II/III, jenjang strata 1 / diploma IV dan jenjang pendidikan strata 2 atau 3.

Gambaran tingkat pendidikan pekerja di Sulawesi Barat pada bulan Agustus 2021 disajikan pada Gambar 2.5. Mayoritas pekerja di Sulawesi Barat masih berpendidikan rendah (62,02 persen). Pekerja dengan tingkat pendidikan menengah sebesar 25,16 persen, sedangkan pekerja dengan pendidikan tinggi hanya sebesar 12,82 persen. Dilihat dari jenis kelaminnya, pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan menengah pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Sementara itu, sebaliknya pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Kemungkinan penyebabnya adalah perempuan dengan pendidikan menengah kebawah cenderung tidak masuk dalam pasar kerja, sedangkan perempuan dengan pendidikan tinggi akan lebih percaya diri untuk terlibat langsung sebagai angkatan kerja.

Gambar 2.5
Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021



Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

Jika dirinci menurut klasifikasi daerah, terlihat perbedaan mencolok antara tingkat pendidikan pekerja di wilayah perkotaan dan perdesaan. Kelompok pekerja dengan tingkat pendidikan rendah di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Selisih antara keduanya mencapai 13,65 persen poin. Untuk kelompok tingkat pendidikan menengah dan tingkat pendidikan tinggi, persentase pekerja di wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan, bahkan selisih untuk kelompok tingkat pendidikan tinggi mencapai 10,05 persen poin. Hal ini dimungkinkan karena ketersediaan sarana pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi di wilayah kota lebih memadai di wilayah perdesaan. Ketika penduduk di wilayah perkotaan merasa pendidikannya sudah cukup untuk masuk ke pasar kerja barulah mereka terlibat langsung sebagai angkatan kerja, sehingga pekerja di wilayah kota cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan di desa. Sedangkan penduduk di wilayah perdesaan walaupun dengan pendidikan rendah cenderung lebih cepat masuk ke pasar kerja.



BAB III
PENGANGGURAN
DAN
SETENGAH PENGANGGURAN

3.1. Pengangguran

Pengangguran didefinisikan sebagai mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan dan bersedia untuk bekerja. Secara spesifik, penganggur dalam sakernas terdiri dari:

1. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
4. Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja

Pada Agustus 2021, jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 22,21 ribu orang, terdiri dari 14,53 ribu laki-laki dan 7,68 ribu perempuan. Dilihat dari wilayahnya, jumlah pengangguran di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja di desa yang lebih tinggi dibandingkan di kota, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.

Salah satu indikator utama statistik ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja serta menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Selain itu, TPT juga menggambarkan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi penduduk yang ingin bekerja tapi belum mendapatkannya. TPT diperoleh dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja.

TPT Sulawesi Barat pada bulan Agustus 2021 sebesar 3,13 persen atau sebanyak 22,21 ribu orang. Artinya, dari 100 angkatan kerja terdapat 3 orang yang menganggur. Tingkat pengangguran di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada perdesaan, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran terbuka pada perempuan lebih rendah daripada laki-laki.



Tabel 3.1
Jumlah Angkatan Kerja, Pengangguran, dan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Uraian	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	143 563	565 189	434 986	273 766	708 752
Pengangguran	6 693	15 515	14 533	7 675	22 208
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,66	2,75	3,34	2,80	3,13

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

Dalam publikasi ini, pengangguran dikelompokkan menjadi dua kelompok usia, yaitu TPT umur muda dan TPT umur dewasa. Umur muda disini didefinisikan sebagai penduduk usia 15-24 tahun, sedangkan penduduk kelompok umur dewasa adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Secara total, TPT penduduk kelompok umur muda pada Agustus 2021 mencapai 11,58, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPT umur dewasa. Dilihat dari wilayahnya, TPT muda di wilayah kota lebih tinggi daripada TPT umur muda di desa. Sedangkan jika dirinci menurut jenis kelaminnya, TPT umur muda pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. TPT kelompok umur dewasa di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah desa. Kemudian, menurut jenis kelaminnya, TPT umur dewasa pada laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan TPT umur dewasa perempuan.

Rasio TPT umur muda terhadap TPT umur dewasa secara total sebesar 7,99. Artinya, besaran TPT umur muda hampir delapan kali lipat TPT umur dewasa. Di sisi lain, *share* penganggur umur muda terhadap total penganggur di Provinsi Sulawesi Barat cukup tinggi. Secara total, *share* penganggur umur muda terhadap total penganggur mencapai 61,49 persen. Artinya, dari 100 penduduk menganggur, 61 orang diantaranya adalah penganggur umur muda (15-24 tahun).

Tabel 3.2
Indikator Pengangguran Umur Muda dan Umur Dewasa
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Uraian	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TPT Umur Muda (15-24 tahun)	14,85	10,73	11,19	12,32	11,58
TPT Umur Dewasa (25 tahun ke atas)	2,57	1,16	1,66	1,11	1,45
Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Dewasa	5,78	9,25	6,74	11,1	7,99
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur	54,21	64,63	58,96	66,28	61,49

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

Pembahasan mengenai pengangguran tidak dapat dilepaskan dari tingkat pendidikan penganggur, disamping berkaitan dengan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika diketahui bahwa orang yang berpendidikan rendah memiliki tingkat pengangguran tinggi maka kebijakan yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka, atau menciptakan lapangan pekerjaan khusus bagi mereka dengan tingkat keterampilan rendah (*low skilled job*). Selanjutnya, apabila diketahui bahwa *share* penganggur berpendidikan tinggi cukup besar maka hal tersebut menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang membutuhkan keahlian tinggi yang tersedia dalam pasar tenaga kerja. Untuk keperluan analisis, tingkat pendidikan pada pengangguran dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

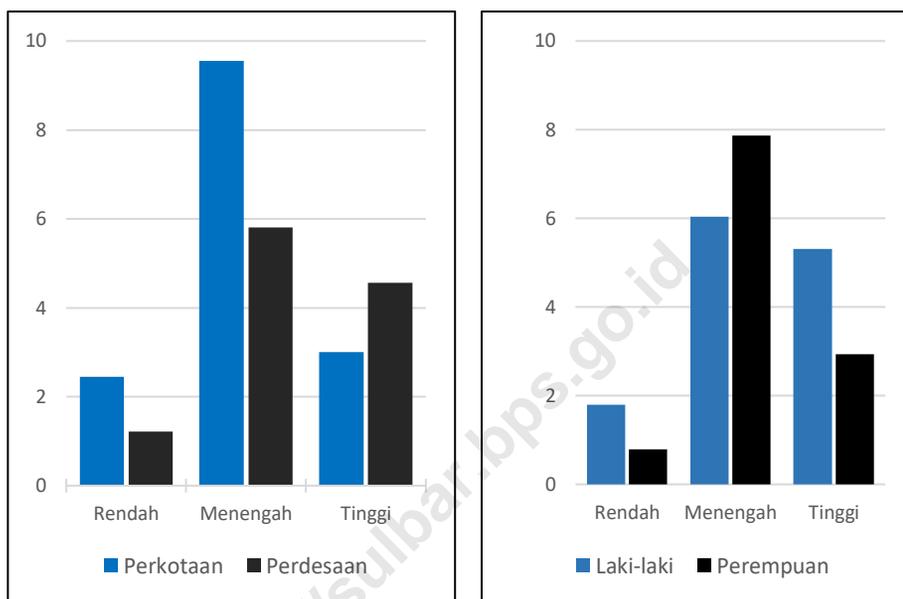
1. Pendidikan rendah, yaitu pekerja yang telah menamatkan pendidikan maksimal pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pekerja yang tidak/belum pernah sekolah dan belum tamat sekolah dasar, tamat sekolah dasar atau sederajat, dan tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

2. Pendidikan Menengah yaitu pekerja yang sudah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pekerja yang tamat sekolah menengah atas atau sederajat dan sekolah menengah kejuruan.
3. Pendidikan Tinggi yaitu pekerja yang sudah menamatkan pendidikan minimal diploma I. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pekerja yang tamat Diploma I/II/III, jenjang strata 1 / diploma IV dan jenjang pendidikan strata 2 atau 3.

Apabila pengangguran diklasifikasikan menurut karakteristik pendidikan seperti yang disajikan pada Gambar 3.1, terlihat bahwa pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat pada Agustus 2021 didominasi oleh pengangguran dengan tingkat pendidikan menengah (SLTA/sederajat). Posisi tertinggi kedua ditempati oleh pengangguran dengan tingkat pendidikan tinggi (perguruan tinggi), dan yang terendah adalah pengangguran dengan tingkat pendidikan rendah (SLTP/sederajat ke bawah). Tingkat pengangguran dengan pendidikan tinggi lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengangguran dengan pendidikan rendah. Hal ini disebabkan karena orang dengan pendidikan tinggi lebih selektif dalam memilih jenis pekerjaan yang dianggap sesuai untuk dirinya, sedangkan orang dengan pendidikan rendah umumnya akan bersedia bekerja di sektor manapun asalkan dapat memperoleh pendapatan/penghasilan.

Di wilayah perkotaan, tingkat pengangguran dengan pendidikan menengah merupakan yang tertinggi dibandingkan penganggur dengan pendidikan rendah dan tinggi. Di wilayah perkotaan, pengangguran dengan tingkat pendidikan menengah mencapai 9,55 persen, sedangkan pengangguran dengan tingkat pendidikan rendah 2,45 persen dan tingkat pendidikan tinggi 3,00 persen. Sama halnya dengan wilayah perkotaan, pengangguran di wilayah perdesaan didominasi oleh pengangguran dengan pendidikan menengah (5,81 persen), disusul dengan pengangguran berpendidikan tinggi (4,56 persen) dan pendidikan rendah (1,22 persen). Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan dan perdesaan masih dibutuhkan lapangan pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan menengah, sehingga angkatan kerja dengan pendidikan menengah ini dapat diserap pasar kerja.

Gambar 3.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021



Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

Pada Gambar 3.1, disajikan tingkat pengangguran menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, pola struktur pengangguran pada laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama. Pengangguran pada laki-laki dan perempuan paling banyak didominasi oleh pengangguran dengan tingkat pendidikan menengah, diikuti oleh tingkat pengangguran dengan pendidikan tinggi dan tingkat pengangguran dengan tingkat pendidikan rendah. Tingkat pengangguran laki-laki dengan pendidikan menengah sebesar 6,04 persen dan tingkat pengangguran pada perempuan dengan pendidikan menengah sebesar 7,87 persen.

3.2. Setengah Penganggur

Setengah penganggur (*under employment*) didefinisikan sebagai penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja dibawah batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), dengan kondisi:

1. Mereka dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a) Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya sekarang;
 - b) Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
2. Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

Tingkat setengah pengangguran dapat menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja yang mampu memanfaatkan keahlian, pengalaman dan kesediaan bekerja yang dimiliki tenaga kerjanya. Tingkat setengah pengangguran dapat memberikan gambaran tentang kualitas, produktivitas, dan tingkat pemanfaatan lapangan kerja yang tersedia, terutama di negara-negara dengan tingkat pengangguran terbuka rendah.

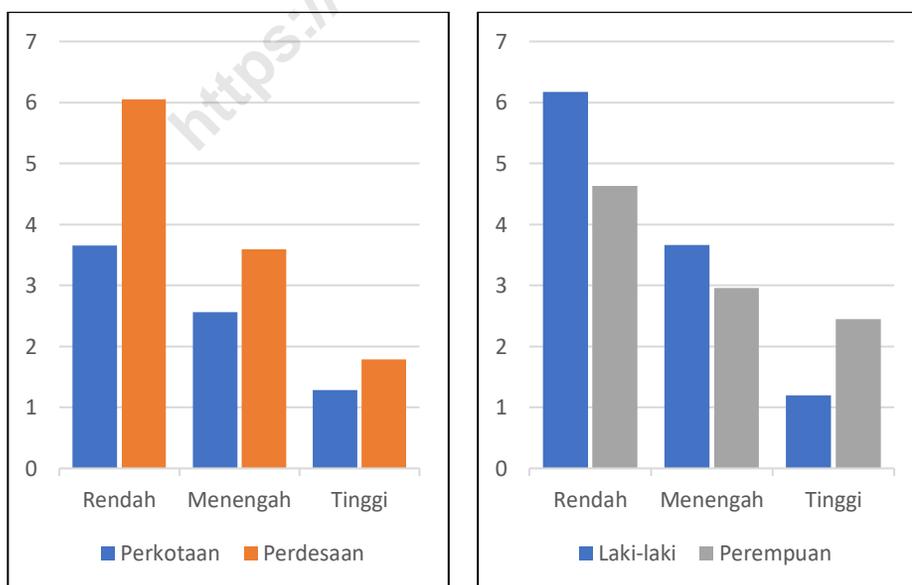
Tabel 3.3
Indikator Setengah Penganggur di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Uraian	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Setengah Penganggur	10 260	62 854	46 395	26 719	73 114
Persentase Setengah Penganggur terhadap Total Angkatan Kerja	7,15	11,12	10,67	9,76	10,32
Persentase Setengah Penganggur terhadap Total Penduduk Bekerja	7,50	11,43	11,03	10,04	10,65

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

Gambaran setengah pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.3. Jumlah total setengah penganggur di Sulawesi Barat pada tahun 2021 adalah 73,11 ribu orang. Dilihat dari karakteristik daerahnya, setengah penganggur di wilayah desa lebih banyak, mencapai 62,85 ribu orang. Selain itu, setengah penganggur berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46,40 ribu orang, lebih tinggi dari setengah penganggur perempuan (26,72 ribu orang). Kontribusi setengah penganggur terhadap total angkatan kerja di Sulawesi Barat adalah 10,32 persen. Sedangkan terhadap total penduduk bekerja, kontribusi setengah pengangguran mencapai 10,65 persen. Meskipun angka setengah pengangguran di desa dan setengah pengangguran pada penduduk laki-laki cukup tinggi, kontribusi setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja maupun terhadap total penduduk yang bekerja berada pada kisaran 9,76 sampai 11,43 persen.

Gambar 3.2
Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

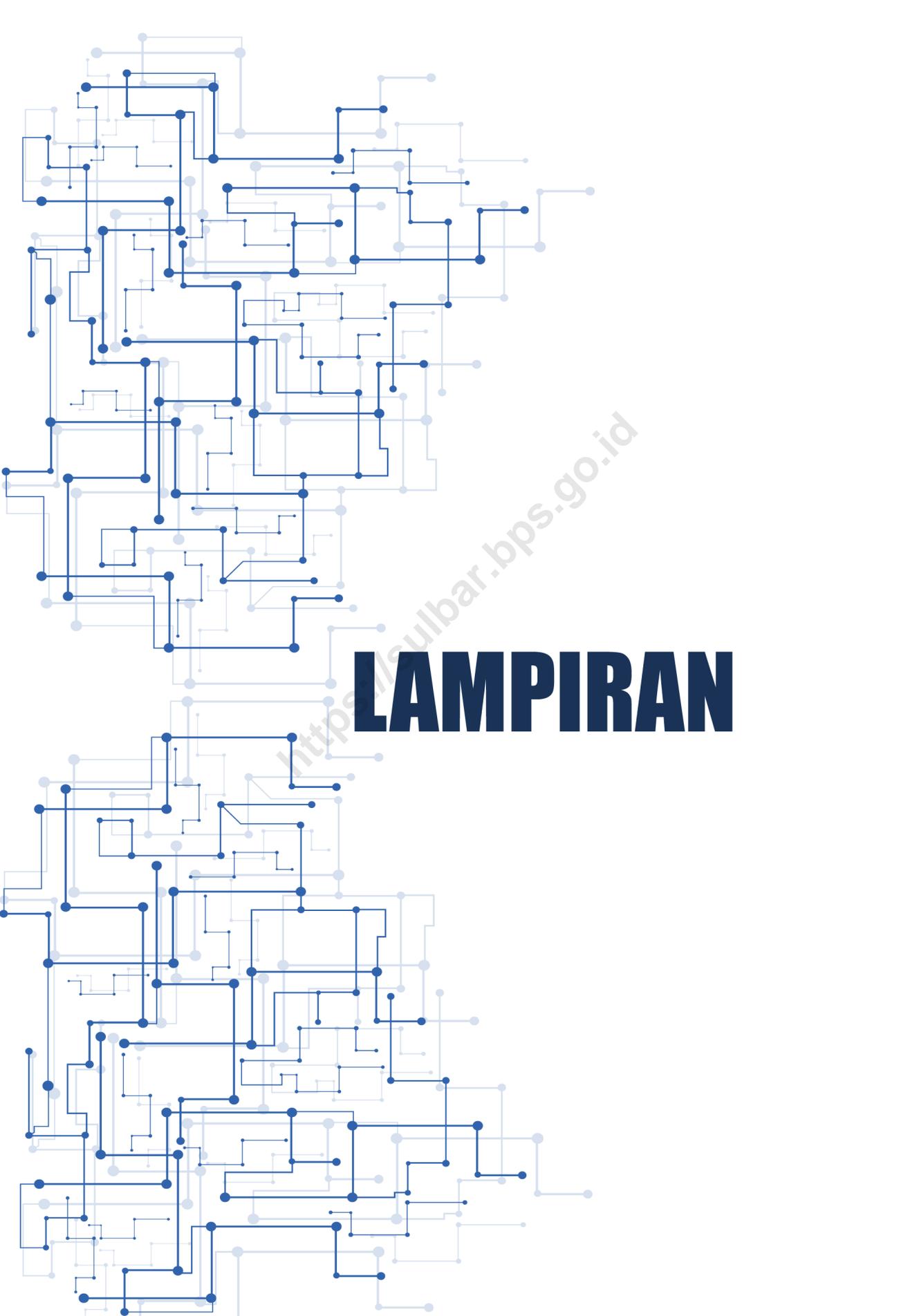


Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021



Persentase setengah pengangguran menurut tingkat pendidikan, klasifikasi daerah, dan jenis kelamin disajikan pada Gambar 3.2. Persentase setengah pengangguran semakin kecil seiring dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Secara umum, penyumbang *share* setengah penganggur tertinggi adalah kelompok setengah penganggur dengan tingkat pendidikan rendah (5,58 persen), diikuti oleh setengah penganggur dengan tingkat pendidikan menengah (3,39 persen), dan setengah penganggur dengan tingkat pendidikan tinggi (1,69 persen).

Wilayah perkotaan dan perdesaan memiliki pola persentase setengah pengangguran yang sama. Di wilayah perkotaan, *share* setengah penganggur berpendidikan tinggi adalah yang tertinggi dibanding penganggur dengan pendidikan menengah dan rendah, begitu juga di wilayah perdesaan. Berdasarkan jenis kelamin, *share* setengah penganggur pada laki-laki dan perempuan juga memiliki pola yang sama. Setengah penganggur pada kelompok laki-laki dan perempuan paling banyak didominasi oleh setengah penganggur berpendidikan tinggi, kemudian diikuti oleh setengah penganggur berpendidikan menengah dan pendidikan rendah.



<https://sulbar.bps.go.id>

LAMPIRAN

TABEL 1A
 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Jenis Kegiatan, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi
 Barat, 2021

Kegiatan	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bekerja	136 870	549 674	420 453	266 091	686 544
Pengangguran Terbuka	6 693	15 515	14 533	7 675	22 208
Sekolah	12 947	44 817	26 699	31 065	57 764
Mengurus Rumah Tangga	41 216	162 925	19 874	184 267	204 141
Lainnya	8 173	29 821	23 667	14 327	37 994
Jumlah	205 899	802 752	505 226	503 425	1 008 651

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021



Tabel 1B
 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 – 2021

Kegiatan	2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bekerja	675,135	672 986	693 833	686 544
Pengangguran Terbuka	16,499	23 132	23 495	22 208
Sekolah	74,326	60 657	49 120	57 764
Mengurus Rumah Tangga	187,739	199 584	171 328	204 141
Lainnya	29,160	35 364	62 505	37 994
Jumlah	982,859	991 723	1 000 281	1 008 651

Sumber: Diolah dari Sakernas 2020 - 2021

Tabel 2A
 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Kelompok Umur, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi
 Barat, 2021

Kelompok Umur	Kota	Desa	Laki-laki	Perem- puan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15-24	49 854	188 706	119 015	119 545	238 560
25-34	42 919	177 132	111 285	108 766	220 051
35-54	76 089	300 578	192 109	184 558	376 667
55+	37 037	136 336	82 817	90 556	173 373
Jumlah	205 899	802 752	505 226	503 425	1 008 651

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021



Tabel 2B
 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 – 2021

Kelompok Umur	2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	(1)	(2)	(3)	(4)
15-24	236,326	238 013	237 691	238 560
25-34	217,584	217 713	219 545	220 051
35-54	367,649	370 918	374 118	376 667
55+	161,300	165 079	168 927	173 373
Jumlah	982,859	991 723	1 000 281	1 008 651

Sumber: Diolah dari Sakernas 2020 – 2021

Tabel 3A
 Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Kelompok Umur, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi
 Barat, 2021

Kelompok Umur	Kota	Desa	Laki-laki	Perem- puan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15-24	24 431	93 457	76 601	41 287	117 888
25-34	33 598	134 229	105 854	61 973	167 827
35-54	64 752	248 583	186 447	126 888	313 335
55+	20 782	88 920	66 084	43 618	109 702
Jumlah	143 563	565 189	434 986	273 766	708 752

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021



Tabel 3B
 Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 – 2021

Kelompok Umur	2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-24	117 869	120 979	138 251	117 888
25-34	169 902	165 137	178 149	167 827
35-54	303 836	305 887	299 443	313 335
55-64+	100 027	104 115	101 485	109 702
Jumlah	691 634	696 118	717 328	708 752

Sumber: Diolah dari Sakernas 2020 – 2021

Tabel 4A
 Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Jenis Kegiatan, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi
 Barat, 2021

Kegiatan	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bekerja Penuh*	80 762	254 775	227 750	107 787	335 537
Bekerja Paruh Waktu	45 848	232 045	146 308	131 585	277 893
Setengah Pengangguran	10 264	62 854	46 395	26 719	73 114
Pengangguran Terbuka	6 693	15 515	7 675	13 838	22 208
Jumlah	143 567	565 189	428 128	279 929	708 752

*) Termasuk sementara tidak bekerja

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020



Tabel 4B
 Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 – 2021

Jenis Kegiatan (1)	2020		2021	
	Februari (2)	Agustus (3)	Februari (4)	Agustus (5)
	Bekerja Penuh	337 738	318 412	339 600
Bekerja Paruh Waktu	236 619	273 957	300 425	277 893
Setengah Pengangguran	100 778	80 617	53 808	73 114
Pengangguran Terbuka	16 499	23 132	23 495	22 208
Jumlah	691 634	696 118	717 328	708 752

Sumber: Diolah dari Sakernas 2020 – 2021

Tabel 5A
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama, Wilayah, dan Jenis Kelamin di
 Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	27 026	297 152	229 439	94 739	324 178
Industri Pengolahan	14 954	43 471	30 549	27 876	58 425
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	43 294	79 219	42 521	79 992	122 513
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	31 451	73 118	46 411	58 158	104 569
Lainnya	20 145	56 714	71 533	5 326	76 859
Jumlah	136 870	549 674	420 453	266 091	686 544

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

Tabel 5B
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut
 Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 – 2021

Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama (1)	2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	316 375	337 770	333 408	324 178
Industri Pengolahan	42 317	51 431	53 409	58 425
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	141 062	115 121	147 656	122 513
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	104 328	98 135	91 178	104 569
Lainnya	71 053	70 529	68 182	76 859
Jumlah	675 135	672 986	693 833	686 544

Sumber: Diolah dari Sakernas 2020 – 2021

Tabel 6A
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Status Pekerjaan/Usaha Utama, Wilayah, dan Jenis Kelamin di
 Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Status Pekerjaan/Usaha Utama	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	34 687	114 637	94 710	54 614	149 324
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Tidak Dibayar	22 898	143 571	118 326	48 143	166 469
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Karyawan	2 923	5 427	6 465	1 885	8 350
Buruh/Karyawan/Pegawai	49 241	129 174	112 141	66 274	178 415
Pekerja Bebas di Pertanian	715	20 606	18 671	2 650	21 321
Pekerja Bebas di Non Pertanian	8 431	19 901	26 385	1 947	28 332
Pekerja Tidak Dibayar/Pekerja Keluarga	17 975	116 358	43 755	90 578	134 333
Jumlah	136 870	549 674	420 453	266 091	686 544

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

Tabel 6B
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut
 Status Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 – 2021

Status Pekerjaan/Usaha Utama	2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha Sendiri	141 491	139 015	138 355	149 324
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Tidak Dibayar	190 855	159 890	190 171	166 469
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Karyawan	8 945	14 587	9 241	8 350
Buruh/Karyawan/Pegawai	169 997	169 615	152 293	178 415
Pekerja Bebas di Pertanian	19 076	21 280	21 182	21 321
Pekerja Bebas di Non Pertanian	14 605	24 232	24 298	28 332
Pekerja Tidak Dibayar/Pekerja Keluarga	130 166	144 367	158 293	134 333
Jumlah	675 135	672 986	693 833	686 544

Sumber: Diolah dari Sakernas 2020 – 2021

Tabel 7A
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jam Kerja
 Selama Seminggu yang Lalu, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi
 Barat, 2021

Jam Kerja	Kota	Desa	Laki-laki	Perem- puan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0*)	8 190	36 397	27 358	17 229	44 587
1-7	4 948	35 713	16 862	23 799	40 661
8-14	13 498	74 831	40 169	48 160	88 329
15-24	20 668	103 123	70 769	53 022	123 791
25-34	16 994	81 232	64 903	33 323	98 226
35+	72 572	218 378	200 392	90 558	290 950
Jumlah	136 870	549 674	420 453	266 091	686 544

Keterangan: *) Sementara tidak bekerja

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021



Tabel 7B
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jam Kerja
 Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 – 2021

Jam Kerja	2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0*)	17 119	29 026	28 295	44 587
1-7	39 217	45 330	50 091	40 661
8-14	65 863	85 170	78 231	88 329
15-24	118 855	120 211	120 868	123 791
25-34	113 462	103 863	105 043	98 226
35+	320 619	289 386	311 305	290 950
Jumlah	675 135	672 986	693 833	686 544

Sumber: Diolah dari Sakernas 2020 – 2021

Tabel 8A
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi
 Barat, 2021

Tingkat Pendidikan	Kota	Desa	Laki-laki	Perem- puan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tamat SD ke bawah	52 157	279 221	205 281	126 097	331 378
SMP Sederajat	17 771	76 661	59 420	35 012	94 432
Sekolah Menengah Umum	27 220	88 200	77 188	38 232	115 420
Sekolah Menengah Kejuruan	11 156	46 139	37 419	19 876	57 295
Diploman I/ II/ III	3 319	10 344	4 667	8 996	13 663
Strata I ke atas	25 247	49 109	36 478	37 878	74 356
Jumlah	136 870	549 674	420 453	266 091	686 544

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021



Tabel 8B
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 – 2021

Tingkat Pendidikan	2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	(1)	(2)	(4)	(5)
Tamat SD ke bawah	333 473	329 641	311 677	331 378
SMP Sederajat	97 696	103 976	112 899	94 432
Sekolah Menengah Umum	101 762	105 433	131 495	115 420
Sekolah Menengah Kejuruan	48 358	52 901	57 450	57 295
Diploman I/ II/ III	12 932	12 095	12 881	13 663
Strata I ke atas	80 914	68 940	67 431	74 356
Jumlah	675 135	672 986	693 833	686 544

Sumber: Diolah dari Sakernas 2020 – 2021

Tabel 9A
 Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
 Menurut Kelompok Umur, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi
 Barat, 2021

Uraian	Kota	Desa	Laki-laki	Perem- puan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja					
15-24	24 431	93 457	76 601	41 287	117 888
25+	119 132	471 732	358 385	232 479	590 864
Pengangguran Terbuka					
15-24	3 628	10 027	8 568	5 087	13 655
25+	3 065	5 488	5 965	2 588	8 553

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021

Tabel 9B
 Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
 Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 – 2021

Uraian	2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkatan Kerja				
15-24	117 869	120 979	138 251	117 888
25+	573 765	575 139	579 077	590 864
Pengangguran Terbuka				
15-24	10 931	10 551	10 753	13 655
25+	5 568	12 581	12 742	8 553

Sumber: Diolah dari Sakernas 2020 – 2021

Tabel 10A
 Jumlah Pengangguran Terbuka Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Tingkat Pendidikan, Wilayah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi
 Barat, 2021

Uraian	Kota	Desa	Laki-laki	Peremp uan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tamat SMP ke Bawah	1 754	4 393	4 857	1 290	6 147
SMU atau Sederajat	4 054	8 280	7 370	4 964	12 334
Perguruan Tinggi	885	2 842	2 306	1 421	3 727
Jumlah	6 693	12 334	14 533	7 675	22 208

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2021



Tabel 10B
 Jumlah Pengangguran Terbuka Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020 – 2021

Uraian	2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	(1)	(2)	(3)	(4)
Tamat SMP ke Bawah	3 232	8 568	9 547	6 147
SMU atau Sederajat	9 162	10 765	10 504	12 334
Perguruan Tinggi	4 105	3 799	3 444	3 727
Jumlah	16 499	23 132	23 495	22 208

Sumber: Diolah dari Sakernas 2020 – 2021

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT

Jl. RE Martadinata No. 10 Mamuju
Telp. (0426) 21265, Fax. (0426) 22103
Email: sulbar@bps.go.id
Homepage: <http://sulbar.bps.go.id>

ISSN 2655-0334



9 772655 033405